

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

Oleh:

Siti Khofifah Hanif¹

Joko Suharianto²

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara (2021).

Korespondensi Penulis: sitihanif.7243240005@mhs.unimed.ac.id, djoko@unimed.ac.id.

Abstract. *Regional government expenditure plays a highly significant role in ensuring equitable and sustainable regional development. This study aims to conduct an in-depth analysis of the effects of inflation, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and exports on government expenditure in North Sumatra Province during the period of 2001 to 2024. The data utilized are secondary in nature, sourced from the official publication 'North Sumatra in Figures' by the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra. The study employs the Ordinary Least Squares (OLS) regression method to quantitatively measure the relationship between the independent variables and government expenditure. The findings reveal that, simultaneously, inflation, GRDP, and exports significantly influence regional government spending. However, when examined partially, only GRDP and exports exhibit a significant impact, whereas inflation does not. The coefficient of determination (R-squared) value of 97.79% indicates that the majority of variation in government expenditure can be explained by these three variables. These results underscore the importance of implementing regional economic policies that focus on boosting economic output and export performance, as well as maintaining inflation stability. Such measures are essential to ensure that government expenditure is effectively*

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

allocated to support sustainable development and improve the quality of public services across the region.

Keywords: *Inflation, GDRP, Export, Government Expenditure, North Sumatra.*

Abstrak. Pengeluaran pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah secara merata dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan ekspor terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2001 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi 'Sumatera Utara Dalam Angka' yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi *Ordinary Least Squares* (OLS), yang mampu menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel yakni inflasi, PDRB, dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Namun, dalam pengujian parsial, hanya PDRB dan ekspor yang terbukti berpengaruh signifikan, sementara inflasi tidak memiliki pengaruh yang berarti. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 97,79% mencerminkan bahwa sebagian besar variasi dalam pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang berfokus pada peningkatan output ekonomi dan daya saing ekspor, serta perlunya pengendalian inflasi agar pengeluaran pemerintah lebih tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Inflasi, PDRB, Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, Sumatera Utara.

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan upaya penting yang dilakukan setiap negara untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan (Safari & Fikri, 2016). Dalam konteks makroekonomi, salah satu instrumen penting dalam mendukung

pembangunan nasional adalah pengeluaran pemerintah. Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memainkan peran sentral dalam menstimulasi permintaan agregat guna mendorong pertumbuhan ekonomi (Saputra, 2015). Di era modern, konsep pengeluaran fiskal semakin kompleks, tidak hanya sebagai alat penyeimbang siklus ekonomi, tetapi juga sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan regional dan memperkuat infrastruktur publik. Dengan demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia memiliki peran strategis dalam dinamika pembangunan nasional. Terletak di bagian utara Pulau Sumatera, provinsi ini merupakan provinsi terluas keempat di Sumatera setelah Riau, Sumatera Selatan, dan Aceh, dengan luas wilayah mencapai 72.981,23 km² (Statistik & Utara, 2024). Sumatera Utara memiliki karakteristik geografis yang heterogen dengan potensi ekonomi yang besar, khususnya di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan luar negeri. Meskipun demikian, tantangan pembangunan masih terus dihadapi, seperti ketimpangan antarwilayah, infrastruktur yang belum merata, dan dinamika sosial ekonomi yang fluktuatif. Oleh karena itu, efektivitas pengeluaran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi belanja daerah Sumatera Utara mencapai Rp19,8 triliun, naik dari Rp17,4 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan belanja pemerintah nasional yang mencapai Rp3.061 triliun pada tahun yang sama, kontribusi Sumatera Utara masih relatif kecil. Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah belum sepenuhnya sejalan dengan laju pembangunan wilayah. Beberapa indikator, seperti angka kemiskinan yang masih berada di atas 8% dan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota, menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran belum selalu diikuti oleh efektivitas dalam hasil pembangunan. Hal ini mengindikasikan perlunya analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah daerah agar kebijakan fiskal yang dijalankan lebih tepat sasaran.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi pengeluaran pemerintah adalah inflasi. Inflasi, sebagai indikator kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian, berimplikasi langsung pada daya beli dan efisiensi alokasi anggaran

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

pemerintah. Menurut teori ekonomi fiskal, inflasi dapat menurunkan nilai riil dari pengeluaran pemerintah, sehingga memengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik secara optimal. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa turut naik, sementara anggaran pemerintah yang tidak mengalami penyesuaian akan kehilangan daya belinya. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan fiskal menjadi penting untuk menjaga efektivitas pengeluaran pemerintah. (Priyono & Handayani, 2021) menyatakan bahwa “inflasi mengikis nilai riil dari belanja pemerintah, sehingga diperlukan penyesuaian dalam kebijakan fiskal untuk mempertahankan penyediaan layanan publik.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya berdampak pada sektor swasta, melainkan juga menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap struktur anggarannya. Di sisi lain, dalam kondisi inflasi tinggi, pemerintah dapat terdorong untuk meningkatkan pengeluaran sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Variabel penting lainnya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. (Riani & Nelvia Iryani, 2023) berpendapat mengenai fungsi alokasi dan distribusi pemerintah, di mana sektor publik berperan dalam menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi untuk membiayai pengeluaran yang produktif. Berdasarkan penelitian (Suhariato & Lubis, 2022) PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD, membaiknya ekonomi suatu daerah akan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat sehingga mudah dalam memenuhi kewajibannya. Teori (Patrocinio et al., 2023) apabila sektor berpendapatan tinggi mendominasi PDRB, maka daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang lebih sebagai pendapatan asli daerahnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeluarkan dana untuk pembangunan daerah. Peningkatan output regional dapat memperbesar kapasitas fiskal suatu daerah melalui bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta besarnya dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran yang mendukung pembangunan. Penelitian oleh (Manihuruk et al., 2024) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Studi oleh (Halimah & Chaniago, 2025) menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Namun, dalam penelitian (Triwidyati &

Purnamaningsih, 2019) PDRB dapat berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah yang mana ini akan berdampak terhadap penurunan nilai pengeluaran pemerintah yang. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD dengan nilai PDRB yang terus meningkat di daerah penelitiannya.

Selain faktor domestik, variabel eksternal seperti ekspor juga memiliki kontribusi terhadap pengeluaran pemerintah. Ekspor sebagai salah satu komponen utama pendapatan daerah dapat memperluas kapasitas fiskal, baik secara langsung melalui peningkatan penerimaan daerah dari sektor perdagangan luar negeri, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi (Affandi et al., 2018). Dalam konteks Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekspor terbesar di luar Jawa, terutama di sektor komoditas seperti CPO dan karet, ekspor memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh (Manihuruk et al., 2024) menemukan bahwa ekspor memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun tidak secara eksplisit mengkaji pengaruh ekspor terhadap pengeluaran pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global dan stabilitas pasar, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, dinamika ekspor menjadi faktor penting dalam memahami fluktuasi pendapatan daerah dan pengeluaran pemerintah di wilayah tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penting untuk melakukan analisis empiris yang mendalam mengenai pengaruh inflasi, PDRB, dan ekspor terhadap pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara selama periode 2001–2024. Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya dinamika ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi kinerja fiskal daerah. Selain itu, minimnya kajian regional yang memadukan ketiga variabel tersebut secara simultan menegaskan adanya celah penelitian yang menarik untuk dijelajahi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap literatur keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan wilayah.

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif numerik yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan ekspor sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Utara tahun 2001-2024. Data ini bersifat sekunder yang diperoleh dari publikasi Sumatera Utara Dalam Angka setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Squares (OLS) yang bertujuan memperoleh estimasi parameter yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PNGLPM}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{INF}_t + \beta_2 \text{PDRB}_t + \beta_3 \text{EX}_t + \varepsilon_t$$

Di mana:

PNGLPM = Pengeluaran Pemerintah (Miliar)

INF = Inflasi (Persen)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar)

EX = Ekspor (Miliar)

β_0 = Intersep/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independent

ε = Error term/variabel gangguan

Model ini diuji menggunakan *econometric software* Eviews 10 dengan evaluasi regresi yang digunakan meliputi uji asumsi, uji *R-squared* (koefisien determinasi), uji F (signifikansi simultan), dan uji t (signifikansi parsial) untuk mengukur kebaikan dan ketepatan antar pengaruh variabel independen dengan variabel dependen mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Adapun uji asumsi yang digunakan yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Parsial:

- H1: Diduga inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah
- H2: Diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah

- H3: Diduga ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Ho: jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada taraf alpha 5 % pada uji satu arah.
- Ha: jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ pada taraf alpha 5 % pada uji satu arah.

2. Simultan

- H4: Diduga inflasi, PDRB, dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Ho: jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ pada taraf alpha 5 %.
- Ha: jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ pada taraf alpha 5 %.
- Ho: jika $\text{Sig/Prob} > 0,05$.
- Ha: jika $\text{Sig/Prob} < 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi dan Uji Regresi Model OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-658.3139	612.1813	-1.075358	0.2950
INF	-29.12514	42.22962	-0.689685	0.4983
PDRB	0.013713	0.000603	22.73781	0.0000
EX	0.018124	0.003771	4.806078	0.0001
R-squared	0.977950			
Durbin-Watson stat	1.355648			
F-statistic	295.6718			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Normality	Prob (Jarque-Bera)			0.8999
Autocorrelation	Prob (Breusch-Godfrey SC LM Test)			0.4317
Heteroscedasticity	Prob (White Test)			0.5526
Multicollinearity	Centered Variance Inflation Factors :			
	INF			1.587057
	PDRB			1.504085
	EX			1.094509

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

- a) Uji Normalitas, Kriteria apabila nilai Prob. *Jarque Bera* (JB) $> 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. H_0 diterima berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau pengganggu/residual terdistribusi secara normal. H_a diterima berarti terjadi pelanggaran uji asumsi normalitas. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Prob. *Jarque-Bera* sebesar $0,8999 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini.
- b) Uji Autokorelasi, Hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan kriteria jika nilai prob. $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. H_0 diterima berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Prob. sebesar $0,4317 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji autokorelasi dalam model penelitian ini.
- c) Uji Heteroskedastisitas, Hasil *White Test: Heteroskedasticity Test* dengan kriteria jika nilai Prob. $\text{Obs} \times \text{R-squared} > 0,05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1 diketahui Prob. sebesar $0,5526 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam data penelitian ini.
- d) Uji Multikolinearitas, Hasil uji *Variance Inflation Factors* dengan kriteria jika nilai Centered VIF setiap variabel independen $< 10,00$, maka tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas pada data penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1 diketahui nilai *Centered VIF* untuk INF, PDRB, dan EX masing-masing adalah 1,587057; 1,504085; dan 1,094509 dimana semua nilai menunjukkan $< 10,00$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini.

B. Uji Hipotesis

a) Uji Simultan

Kriteria apabila nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti inflasi, PDRB, dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Dari hasil uji diperoleh nilai F hitung

$295,6718 > F \text{ tabel } 3,10 (0.05;3;20)$ dan prob sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima.

b) Uji Parsial

Diperoleh nilai $t \text{ tabel } (0.05;20) = 1.72472$, disimpulkan bahwa:

- 1) Pada variabel inflasi diperoleh nilai $t \text{ hitung } 0.689685 < t \text{ tabel } 1.72472$ dan prob. sebesar $0,4983 > 0,05$, maka H_0 diterima. Artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.
- 2) Pada variabel PDRB diperoleh nilai $t \text{ hitung } 22.73781 > t \text{ tabel } 1.72472$ dan prob. sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_a diterima. Artinya PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.
- 3) Pada variabel ekspor diperoleh nilai $t \text{ hitung } 4.806078 > t \text{ tabel } 1.72472$ dan prob. sebesar $0,0001 < 0,05$, maka H_a diterima. Artinya ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

c) Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui nilai *R-squared* sebesar 0,9779, artinya ada sebanyak 97,79 persen kontribusi variabel pengeluaran pemerintah bisa dijelaskan melalui variabel inflasi, PDRB, dan Ekspor. Sedangkan sisanya 2,21 persen dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

d) Pembahasan Model Analisis

Berikut adalah persamaan regresi yang dihasilkan dari model penelitian ini:

$$\text{PNGLPMt} = -658.3139 - 29.12514\text{INFt} + 0.013713\text{PDRBt} + 0.018124\text{Ext} + \varepsilon_t$$

1. Konstanta sebesar -658,3139 menunjukkan bahwa jika variabel bebas (inflasi, PDRB, ekspor) adalah konstan maka nilai dasar pengeluaran pemerintah adalah sebesar -658.3139. Dalam praktik ekonomi, kondisi ini jarang terjadi dan nilai intersep ini lebih bersifat matematis sebagai titik awal dalam membentuk garis

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

regresi, sehingga tidak selalu memiliki makna ekonomi yang signifikan.

2. Setiap kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi akan menurunkan pengeluaran pemerintah sebesar 29.12514 persen, **dengan asumsi ceteris paribus**. Ini menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengeluaran pemerintah.
3. Setiap kenaikan 1 miliar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0.013713 miliar, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Ini mencerminkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengeluaran pemerintah.
4. Setiap kenaikan 1 miliar pada ekspor akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0.018124 miliar, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pemerintah akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Variabel Inflasi Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Hasil olah data uji regresi menunjukkan bahwa inflasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Artinya hipotesis yang diajukan tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $0,689685 < t \text{ tabel } 1,72472$ dan nilai prob. sebesar $0,4983 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh inflasi terhadap kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara tergolong lemah. Hasil penelitian ini tidak sejalan teori sebelumnya, Heritage Foundation (2022), Inflasi mengurangi nilai asli dari pengeluaran pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian dalam kebijakan fiskal untuk dapat mempertahankan pelayanan publik. Dengan kata lain

hasil penelitian ini menolak teori Haritage Foundation secara empiris dalam konteks lokal.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Ronaldo, 2019) yang menyatakan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh atau kontribusi secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena adanya korelasi terbalik antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian oleh Lestari (2021) juga menyatakan bahwa inflasi tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga produksi akan mengakibatkan masyarakat menurunkan permintaannya bukan barang atau jasa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan peningkatan atau penurunan jumlah pengeluaran pemerintah.

Secara logis, hasil penelitian ini dapat diterima karena mencerminkan kondisi faktual kebijakan fiskal di tingkat pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara, yang cenderung mengandalkan alokasi anggaran berdasarkan asumsi makro yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam konteks ini, inflasi regional mungkin tidak menjadi pertimbangan utama karena pemerintah daerah mendapatkan transfer dari pusat dalam jumlah yang sudah ditentukan, sehingga tekanan inflasi lokal tidak secara langsung mengurangi kemampuan belanja pemerintah. Dalam jurnal *Journal of Economic Perspectives*, Alesina dan Perotti (1996) juga menegaskan bahwa belanja pemerintah lebih ditentukan oleh struktur institusi fiskal dan bukan oleh variabel makroekonomi jangka pendek seperti inflasi. Oleh karena itu, secara konseptual dan empiris, hasil penelitian ini dapat diterima dengan penjelasan logis dan didukung oleh teori yang relevan.

B. Variabel PDRB Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin besar nilai PDRB yang dicapai suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan penyediaan

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

layanan publik di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan bahwa $t\text{-hitung sebesar } 22,73781 > t \text{ tabel } 1,72472$ dan prob. sebesar $0,0000 < 0,05$ terbukti bahwa H_a diterima, artinya hipotesis pengaruh PDRB terhadap pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Susanto (2014) dimana PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD, membaiknya ekonomi suatu daerah akan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat sehingga mudah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memberikan peningkatan terhadap nilai yang dapat dikeluarkan pemerintah daerah dalam pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung teori oleh Hanum (2023) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung studi oleh Hutapea dan Siregar (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Musgrave (1959) mengenai fungsi alokasi dan distribusi pemerintah, di mana sektor publik berperan dalam menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi untuk membiayai pengeluaran yang produktif. Pemerintah daerah secara logis akan meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ketika pendapatan daerah meningkat melalui aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Penelitian sebelumnya yang mendukung hasil ini antara lain adalah studi yang dilakukan oleh Rahayu dan Susanto (2021) dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menegaskan bahwa PDRB mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang kemudian memengaruhi skala dan prioritas belanja publik. Selain itu, penelitian oleh Kurniawan dan Putri (2022) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* (Sinta 3) juga menunjukkan hasil serupa di Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa peningkatan PDRB berkorelasi positif dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor pelayanan dasar. Hasil ini mendukung bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan pendorong utama belanja pemerintah. Dengan demikian, konsistensi antara penelitian ini dan studi

terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan pengeluaran pemerintah merupakan fenomena yang stabil dan relevan secara kebijakan fiskal.

Secara logis, ketika PDRB meningkat, berarti aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, dan ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah, baik dari pajak maupun retribusi. Dengan pendapatan yang meningkat, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih besar dan merata. Hal ini sesuai dengan teori *fiscal capacity* yang menyatakan bahwa besarnya kapasitas fiskal daerah sangat ditentukan oleh kinerja ekonomi wilayah tersebut (Bird & Vaillancourt, 2000). Selain itu, berdasarkan teori *fiscal responsiveness*, pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan belanjanya berdasarkan fluktuasi penerimaan yang berasal dari dinamika ekonomi.

C. Variabel Ekspor Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Hasil olah data menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $4,806078 > t$ tabel $1,72471$ dan nilai prob. yang dihasilkan sebesar $0,0001 < 0,05$. Artinya, H_a diterima dan H_o ditolak ini bermakna hipotesis yang diajukan terbukti akan kebenarannya. Hasil penelitian ini mendukung teori (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018) yang menyatakan ekspor sebagai salah satu komponen utama pendapatan daerah dapat memperluas kapasitas fiskal, baik secara langsung melalui peningkatan penerimaan daerah dari sektor perdagangan luar negeri, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Ini bermakna bahwa peningkatan ekspor akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini didukung dan diperkuat oleh data empiris, penelitian oleh Widodo dan Astuti (2021) yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Penelitian tersebut menemukan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Prov. Jawa Barat. Selain itu, hal yang sama juga ditemukan dalam hasil penelitian oleh Yuliana dan Mardani (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

komoditas unggulan daerah berperan dalam meningkatkan penerimaan daerah yang akan berdampak positif pada peningkatan nilai pengeluaran pemerintah dalam dilakukannya pembangunan dan layanan publik. Oleh karena itu, terdapat konsistensi antara hasil penelitian ini dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa ekspor memainkan peran strategis dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah.

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki basis ekonomi pada sektor ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan karet, pertumbuhan ekspor akan secara langsung meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pajak, retribusi, maupun transfer pusat yang berbasis kinerja ekonomi. Ketika nilai ekspor naik, maka surplus perdagangan akan memperkuat pendapatan daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mendanai belanja publik. Hal ini sesuai dengan teori *export-led growth* yang menyatakan bahwa peningkatan ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas kapasitas fiskal (Balassa, 1985).

D. Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Ekspor Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Inflasi, PDRB, dan Ekspor berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji dimana diperoleh nilai F hitung $295,6718 > F$ tabel $3,10 (0.05;3;20)$ dan prob sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima. Artinya, hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Selanjutnya diperoleh nilai *R-squared* sebesar $0,977950$ berarti sekitar $97,79$ persen kontribusi variabel pengeluaran pemerintah bisa dijelaskan melalui variabel inflasi, PDRB, dan Ekspor. Sedangkan sisanya $2,21$ persen dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar model penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, PDRB, dan Ekspor secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi

Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 97,79% variasi dalam pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 2,21% ada pada variabel lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada penurunan nilai inflasi yang dapat mengikis kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan dan perlunya kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan PDRB dan Ekspor untuk mendorong peningkatan penerimaan pemerintah sehingga akan berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, PDRB, dan Ekspor secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan pengeluaran pemerintah dibuktikan dengan diterimanya H_0 . Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel independen lain yang memiliki arah teori dan hal logis yang lebih sesuai. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan hasil penelitian guna terciptanya rancangan regulasi pemerintah yang baik. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian lain untuk memperoleh hasil yang lebih kompleks.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, Zulham, T., & Gunawan, E. (2018). Pengaruh Ekspor, Impor Dan Jumlah Penduduk. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 249–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13021>
- Halimah, P., & Chaniago, S. R. (2025). *The Impact Of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, And Revenue Sharing Fund On Regional Expenditure In Regency / City In Central Java Province (2018-2022) Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap*. 5(2), 215–222.

PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN EKSPOR TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

- Manihuruk, F. E., Sitohang, G. S., & Sari, A. (2024). Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB di Sumatera Utara. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2729>
- Patrocinio, G. B. M., Haukilo, E. B., & Kiha, E. K. (2023). Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Ekspor Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 49–58. <https://doi.org/10.32938/jep.v5i2.4363>
- Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1–10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Riani, I. N., & Nelvia Iryani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 195–205. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.702>
- Safari, M. F., & Fikri, A. A. H. S. (2016). Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional: Penguatan Hubungan Antara Pengembangan Keterampilan, Pendidikan, Dan Ketenagakerjaan Generasi Muda*, 216–227.
- Saputra, M. E. (2015). Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nonomr 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1593–1607.
- Statistik, B. P., & Utara, P. S. (2024). *Volume 16, 2024. 16.*
- Suhariato, J., & Lubis, H. R. (2022). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara. *Niagawan*, 11(2), 168. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i2.35113>
- Triwidyati, E., & Purnamaningsih, N. (2019). Pengaruh Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, dan Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(2), 193. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.452>